



**Dinas Perhubungan**  
Kabupaten Serang

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2021 - 2026



- TIM RENSTRA -

## **KATA PENGANTAR**

Dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Serang sebagai langkah penyesuaian perkembangan dan kemajuan diberbagai aktivitas dan diberbagai bidang, maka diperlukan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 2021 - 2026 Kabupaten Serang.

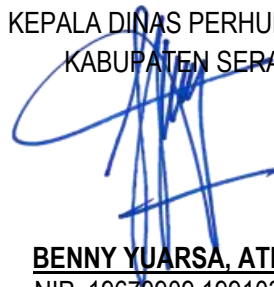
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, target dan indikator kinerja utama (IKU) yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan untuk membangun sektor transportasi dalam kurun waktu Lima Tahun.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini disusun berdasarkan masukan - masukan adanya perkembangan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan dari berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra ini berpegangan pada program kerja dinas sebagai arah dan pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ini masih diperlukan banyak masukan – masukan terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang, untuk itu saran dan kritik terkait kondisi dan situasi yang semakin berkembang sangat diharapkan guna perbaikan dalam penyusunan.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta usaha yang maksimal, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan perhubungan guna tercapainya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Serang.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SERANG



**BENNY YUARSA, ATD, M.Si**  
NIP. 19670909 199103 1 005

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman :</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM .....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
<b>BAB II. ....</b>	<b>9</b>
<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG .....</b>	<b>9</b>
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG .....	9
2.1.1 Tugas Dan Fungsi.....	9
2.1.2 Struktur Organisasi.....	20
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG .....	23
2.2.1 Data Pegawai .....	23
2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Serang .....	25
2.3 KINERJA PELAYANAN.....	26
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	30
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan.....	30

2.4.2	Peluang Pengembangan Pelayanan.....	32
<b>BAB III</b>	.....	<b>33</b>
<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	.....	<b>33</b>
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	33
3.1.1	Permasalahan Di Bidang Perhubungan.....	34
3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	37
3.3	TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN .....	40
3.3.1	Renstra Kementerian Perhubungan .....	40
3.3.2	Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Banten .....	45
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	47
3.4.1	Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Serang.....	47
3.4.2	Implikasi Klhs Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang .....	51
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	51
<b>BAB IV</b>	.....	<b>53</b>
<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	.....	<b>53</b>
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH.....	53
4.1.1	Tujuan.....	53
4.1.2	Sasaran.....	54
<b>BAB V</b>	.....	<b>56</b>
<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	.....	<b>56</b>
4.2	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD .....	56
4.3.1	Strategi .....	56
4.3.2	Kebijakan .....	57

<b>BAB VI.....</b>	<b>61</b>
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF PER SUB KEGIATAN.....</b>	<b>61</b>
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	61
<b>BAB VII.....</b>	<b>103</b>
<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>103</b>
7.1. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	103
7.2. PERJANJIAN KINERJA.....	105
<b>BAB VIII.....</b>	<b>118</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	23
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan .....	24
Tabel 3. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf .....	24
Tabel 4. Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Menurut jenis Kelamin ...	24
Tabel 5. Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang .....	24
Tabel 6. Daftar Sarana Dan Prasarana .....	25
Tabel 7. Daftar Fasilitas Penunjang Keselamatan LLAJ .....	26
Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021 .....	28
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021 .....	29
Tabel 10. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	36
Tabel 11. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang .....	50
Tabel 12. Indikator Sasaran pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang .....	55
Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD .....	59
Tabel 14. Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 .....	70
Tabel 15. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	103

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang .....	22
Gambar 2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah .....	40

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Organisasi Perangkat Daerah/Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD/RKPD Kabupaten Serang, serta keselarasan terhadap Renstra K/L dan Renstra Dishub Propinsi Banten.

Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, daerah maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Serang perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai **Metode** yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga

merupakan suatu **Metode** untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang juga dapat digunakan sebagai :

1. Penyusunan dan penetapan rencana Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran (RKA/DPA);
4. Penyusunan dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK);
5. Pengelolaan data kinerja;
6. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja; dan
8. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Renstra ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang –Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 -2031;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten serang nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

32. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan mengedepankan dokumen perencanaan yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. Sebagai perencanaan Strategis yang memuat visi dan misi Dinas;
2. Sebagai dokumen yang berfungsi untuk memandu arah dan kegiatan Dinas selama 5 (lima) tahun mendatang;
3. Sebagai dokumen yang dapat menjelaskan berbagai kegiatan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas;

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra terdiri dari 8 (Delapan) bab dengan rincian :

Bab I

Merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II

Menyajikan Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

dimana didalamnya menguraikan Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan tingkat capaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### Bab III

Merupakan bab yang menguraikan isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dimana didalamnya menyajikan uraian mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan Isu – Isu Strategis.

### Bab IV

Menguraikan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

### Bab V

Menguraikan Strategi Dan arah Kebijakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

### Bab VI

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

### Bab VII

Merumuskan indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan Perjanjian Kinerja.

## Bab VIII

Merupakan Bab Penutup yang menguraikan antara lain mengenai peranan penting Renstra sebagai pedoman Dinas dan peranan stakeholders dalam tindak lanjut pelaksanaannya.

## **BAB II.**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG**

### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG**

#### **2.1.1 Tugas Dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok :

- a. unsur penunjang Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
- b. pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
- c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional lalulintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan; dan
- d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lalulintas

jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan.

Dalam menjalankan kegiatan operasional Dinas Perhubungan memiliki pejabat-pejabat yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

❖ Kepala Dinas

Tugas :

memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
2. Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
4. Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, keselamatan jalan serta pelayaran dan penerbangan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

❖ Sekretaris

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasional tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keumuman dan kepegawaian.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan operasioanal keumuman dan kepegawaian;
2. Pengaturan penyelenggaran keumuman dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
4. Pengawasan penyelenggaraan keumuman dan kepegawaian;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Keuangan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas keuangan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan keuangan;
2. Pengaturan penyelenggaraan keuangan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan keuangan;
4. Pengawasan penyelenggaraan keuangan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas program dan evaluasi.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan program dan evaluasi;
2. Pengaturan penyelenggaraan program dan evaluasi;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan program dan evaluasi;
4. Pengawasan penyelenggaraan program dan evaluasi;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

❖ Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Penerangan

Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Penerangan Jalan Umum, Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Penerangan Jalan Umum;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas rekayasa
2. lalulintas;
3. Pengaturan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
5. Pengawasan penyelenggaraan tugas rekayasa lalulintas;
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Pelaksanaan urusan Manajemen Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Angkutan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas tugas Pemerintahan Daerah

di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional;

4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Angkutan Jalan, Terminal dan Pengendalian dan Operasional; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Angkutan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas angkutan Jalan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas angkutan Jalan;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Terminal

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Terminal.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Terminal;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Terminal;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Terminal;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Terminal;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

- Pelaksanaan urusan Pengendalian dan Operasional pada Bidang Angkutan Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Keselamatan Jalan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian, Parkir, dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

- Kepala Seksi Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan

Perkeretaapian.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Parkir

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Parkir.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Parkir;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Parkir;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Parkir;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Parkir;
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Pelaksanaan urusan Pengujian Kendaraan Bermotor, pada Bidang Keselamatan Jalan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

❖ Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara;
4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah Bidang Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan serta Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.

➤ Kepala Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan

Tugas :

memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  5. Pelaksanaan tugas tambahan.
- Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan  
Tugas :  
memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan.  
Fungsi :
1. Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
  2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
  4. Pengawasan penyelenggaraan tugas Angkutan Sungai, Danau dan Pelabuhan;
  5. Pelaksanaan tugas tambahan.
- Pelaksanaan urusan Manajemen Transportasi Laut dan Manajemen Transportasi Udara pada Bidang Pelayaran dan Penerbangan, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang melaksanakan fungsi utama di bidang perhubungan darat dan laut di daerah. Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan pelayanan Jasa (by Service Organization Structure) yang merupakan pelayanan jasa pada Sektor Perhubungan. Pada dasarnya, terdapat 5 (lima) pelayanan jasa pada perhubungan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, yaitu :

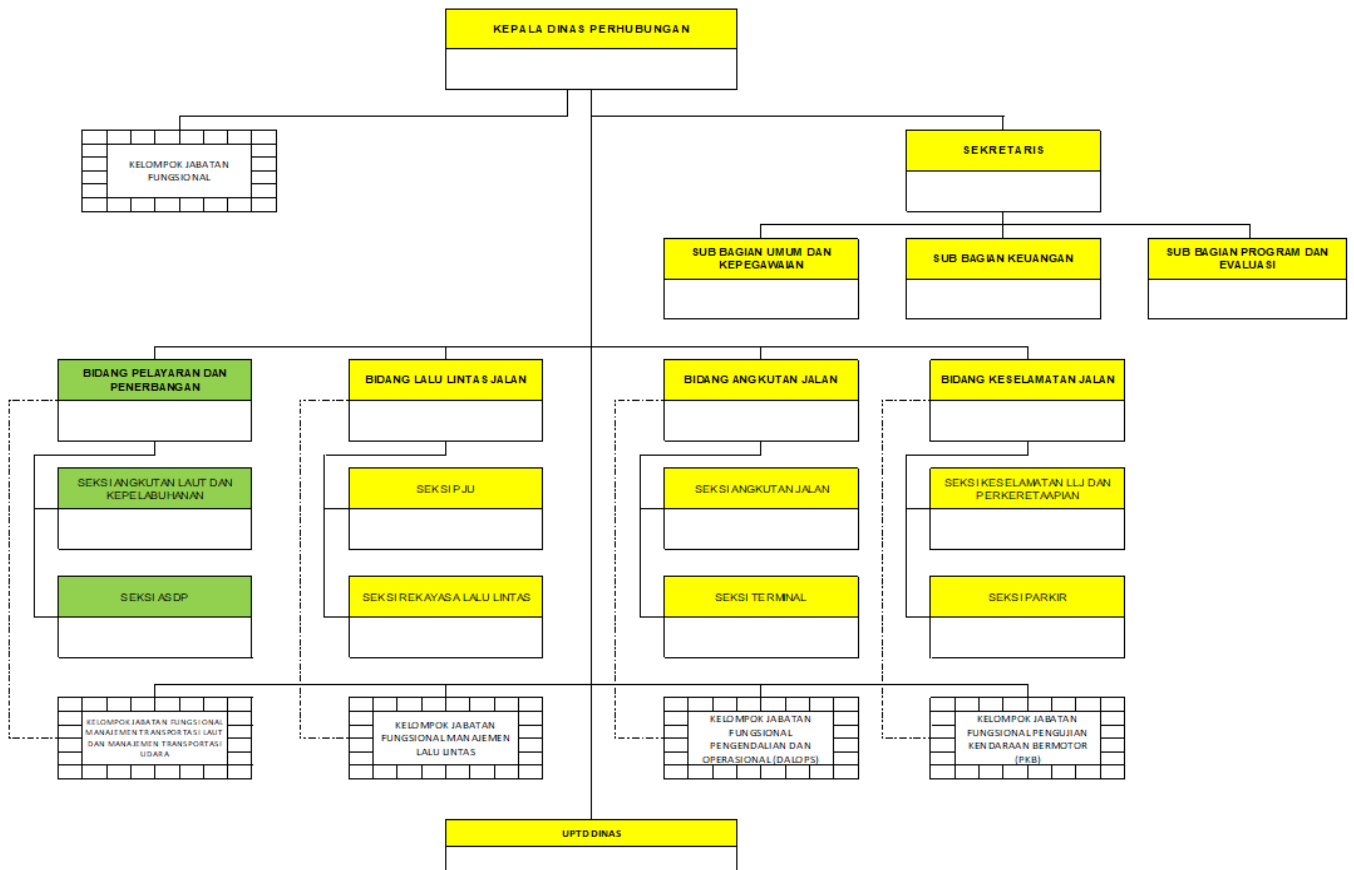
1. pelayanan internal
2. pelayanan Lalu Lintas Jalan
3. Pelayanan Angkutan Jalan
4. Pelayanan Keselamatan Jalan dan
5. Pelayanan Pelayaran dan Penerbangan

Dengan memperhatikan ke-5 pelayanan jasa tersebut struktur organisasi yang saat ini diberlakukan tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Dinas Perhubungan memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Adapun susunan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi :
  - 1. Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - 2. Seksi Rekayasa Lalulintas;
- d. Bidang Angkutan Jalan membawahi:
  - 1. Seksi Angkutan Jalan;
  - 2. Seksi Terminal;
- e. Bidang Keselamatan Jalan membawahi :
  - 1. Seksi Keselamatan Lalulintas Jalan dan Perkeretaapian;
  - 2. Seksi Parkir;
- f. Bidang Pelayaran dan Penerbangan membawahi :
  - 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;
  - 2. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dishub Kab. Serang**

## **2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG**

### **2.2.1 Data Pegawai**

Sumber daya yang diidentikan dengan kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk pencapaian seluruh rencana jangka panjang di Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Faktor internal sebagai modal dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Pada saat dokumen ini dibuat, posisi jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang adalah 303 orang dengan rincian status 65 orang PNS, CPNS 13 Orang dan KKWT 225 Orang.

Secara lengkap, profil kepegawaian meliputi Jumlah, Golongan, status dan latarbelakang pendidikan kepegawaian yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut. Data Nominatif Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
<b>1</b>	Doktor (S-3)	
<b>2</b>	Pasca Sarjana (S-2)	12
<b>3</b>	Sarjana (S-1)	67
<b>4</b>	Diploma (D-3)	18
<b>5</b>	Diploma (D-2)	
<b>6</b>	Diploma (D-1)	
<b>7</b>	SLTA	185
<b>8</b>	SLTP	15
<b>9</b>	SD	6
	<b>Jumlah</b>	<b>303</b>

**Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
<b>1</b>	IV	9
<b>2</b>	III	37
<b>3</b>	II	32
<b>4</b>	I	
	<b>Jumlah</b>	<b>78</b>

**Tabel 3. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf**

No	Esselon	Jumlah
<b>1</b>	Eselon II/b	1
<b>2</b>	Eselon III/a	1
<b>3</b>	Eselon III/b	4
<b>4</b>	Eselon IV/a	14
<b>5</b>	Eselon IV/b	
<b>6</b>	Staf/Pelaksana	283
	<b>Jumlah</b>	<b>303</b>

**Tabel 4. Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Menurut jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
<b>1</b>	Laki - Laki	263
<b>2</b>	Perempuan	40
	<b>Jumlah</b>	<b>303</b>

**Tabel 5. Status Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Serang**

No	Status	Jumlah
<b>1</b>	PNS	65
<b>2</b>	CPNS	13
<b>3</b>	Tenaga Honorer (TKK)	0
<b>4</b>	Tenaga Kerja Kontrak Waktu Tertentu (KKWT)	225
	<b>Jumlah</b>	<b>303</b>

## 2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang terhadap kelancaran pelaksanaan tugas suatu organisasi. Sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan dan penyelenggaraan pelayanan berjalan dengan baik. Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang senantiasa berupaya semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan pelayanan. Adapun Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki adalah sebagai berikut :

**Tabel 6. Daftar Sarana Dan Prasarana**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume
<b>1</b>	<b>Gedung Kantor :</b>	
	- Kantor utama	2.200 m2
	- Kantor PKB	9.949 m2
	- Terminal Tanara	5000 m2
	- Terminal Cikande Permai	1000 m2
	- Terminal Anyer	1.000 m2
	- Terminal Tunjung Teja	3000 m2
	- Kantor ASDP	672,73 m2
	- Tower Gunung Karang	200 m2
<b>2</b>	<b>Kendaraan Dinas :</b>	
	- Roda 4	30 Unit
	- Roda 2	56 Unit
<b>3</b>	Kapal Patroli	3 Unit
<b>4</b>	Halte	17 Unit
<b>5</b>	Kapal Penyebrangan	1 Unit
<b>6</b>	Angkutan Perintis	6 Unit
<b>7</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan Kantor :</b>	
	- Komputer /PC	67 Unit
	- Laptop	31 Unit
	- Printer	50 Unit
	- Meja	83 Buah
	- Kursi	188 Buah

**Tabel 7. Daftar Fasilitas Penunjang Keselamatan LLAJ**

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Terpasang
1	APPIL	
	- Warning Light	9 Unit
2	Rambu Rambu Lalu Lintas	
	- Rambu Standar	545 Buah
	- Rambu RPPJ	122 Buah
3	Marka Jalan	
	- Garis Solid dan Garis Putus	118.681 m'
	- Zebra Cross	8 Unit
4	Guard Rail	1.520 m'
5	Delineator	416 Unit
6	Cermin Tikungan	14 Unit
7	Penerangan Jalan Umum (PJU)	9.182 Titik

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Dalam jangka waktu 5 tahun sebelumnya (tahun 2016-2021), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten serang merupakan keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten serang dalam menyelenggarakan pelayanan perhubungan. Untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten serang disesuaikan dengan sasaran umum pembangunan transportasi yang telah sejalan dengan sasaran pembangunan transportasi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2000-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 pada

Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2016-2021, dan disesuaikan pula dengan Visi dan Misi Kabupaten Serang. Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan transportasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 telah disusun Indikator Kinerja Utama/IKU untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Pada kurun waktu 2016-2021, terjadi perubahan/revisi terhadap Renstra Dinas yang disebabkan adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi

Hasil capaian indikator kinerja sesuai Revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6					7					8				
<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERHUBUNGAN</b>																			
1	Prosentase angkutan umum yang memiliki standar kelayakan (KIR)				52,64	57,86	59,97	64,99	69,95	52,64	57,86	89,83	74,24	67,04	100	100	150	114	96
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas				8,24	7,61	6,98	6,34	5,71	8,24	7,61	5,74	3,20	0,41	100	100	82	51	7,2
3	Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional				50	50	66,67	66,67	66,67	50	50	66,67	66,67	66,67	100	100	100	100	100
4	Persentase pelabuhan penyebrangan yang telah berfungsi/operasional				75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100
5	Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas				40	60	80	100	100	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 - 2021**

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke					Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Persentase angkutan umum yang memiliki standar kelayakan (KIR)	4.364.030.000	1.812.370.000	1.411.510.000	1.770.424.000	758.940.000	3.581.225.000	1.637.050.827	1.232.896.664	1.725.859.340	705.364.800	82	90	87	97	93	-35%	-33%
2	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	5.910.907.000	2.230.680.000	1.111.540.000	1.200.160.000	742.340.000	5.582.930.480	2.073.620.000	1.041.439.000	1.123.108.000	695.000.000	94	93	94	94	94	-40%	-41%
3	Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional	15.923.030.000	9.486.409.778	16.030.486.000	22.606.964.860	14.746.658.350	9.462.937.480	8.445.672.480	15.729.144.885	22.322.807.867	14.593.843.297	59	89	98	99	99	-2%	11%
4	Persentase pelabuhan penyeberangan yang telah berfungsi/operasional	3.828.275.000	3.226.237.450	1.054.981.200	979.391.200	630.400.000	3.098.764.400	2.886.984.900	995.060.350	931.752.375	547.316.600	81	89	94	95	87	-36%	-35%
5	Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran ber lalulintas	4.391.487.000	1.806.127.000	1.146.100.000	7.983.602.000	1.797.920.000	3.919.103.450	1.728.507.600	1.116.641.800	7.854.768.300	1.733.460.070	89	96	97	98	96	-20%	-18%

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Serang yang semakin berkembang, khususnya pengembangan di bidang transportasi yang membutuhkan peningkatan pelayanan, hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang maupun bagi stake holder lainnya.

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diwilayah Kabupaten serang guna mendukung pergerakan Transportasi di wilayah Kabupaten serang
2. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
3. Kemacetan lalu lintas yang menjadi isu strategis. Penanganan kemacetan lalu lintas perlu pendekatan kebijakan multi facet ( level macro = tata ruang, Level Mezzo = transport demand, dan Level Micro = Street level), serta dinamika Kabupaten serang yang berkembang dan merupakan Wilayah industri sehingga tidak terlepas dari lonjakan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap hari/bulan/tahun serta pengguna jalan yang semakin meningkat.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas sehingga perlu dilakukan sosialisasi, pengawasan, Pengendalian dan penertiban lalu lintas serta pembinaan kepada masyarakat. untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas.
5. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan serta meningkatnya pertumbuhan kendaraan, sehingga perlu melakukan penataan, pengawasan, pembinaan dan penertiban yang intensif terhadap juru parkir, pemilik usaha serta pengguna jasa dalam upaya peningkatan pelayanan perparkiran. Selain itu perlu adanya upaya penataan Kawasan perparkiran, seperti penataan dan pembangunan Fasilitas Perparkiran.
6. Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi sehingga perlu adanya kajian dalam hal penataan kembali jaringan trayek diwilayah kabupaten serang.
7. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan pendidikan sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada serta berkembangnya penerapan teknologi pada jenis kendaraan sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap peralatan pengujian kendaraan, dimana kondisi yang ada saat ini sebagian besar peralatan yang digunakan merupakan peralatan tua dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini.
8. Pengembangan pelabuhan lokal sehingga dapat dijadikan salah satu pelabuhan alternatif penghubung pulau pulau terluar diwilayah kabupaten serang.

#### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Serang. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dimana posisi Dinas Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas, Penataan dan Manajemen Perparkiran serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah.
2. Adanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Adanya potensinya retribusi seperti Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), kepelabuhanan, Keterminalan dan Perparkiran.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Adanya kerjasama yang baik/dukungan instansi terkait.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk dalam Daerah sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Di masa mendatang Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Permasalahan transportasi yang dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu dipengaruhi dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya.

Pada bagian perumusan Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

### **3.1.1 Permasalahan Di Bidang Perhubungan**

Adapun permasalahan Transportasi secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan tranportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal – TATRALOK).
2. Penyediaan perlengkapan jalan belum menjangkau seluruh kawasan prioritas yang wajib dipasangkan.
3. Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor belum memadai dimana Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua yang tentunya berpengaruh pada ke akuratan Pengujian sehingga diperlukan peremajaan peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagai upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran sehingga perlu adanya penataan secara terpadu kaitan perparkiran melalui pengembangan sistem dan manajemen perparkiran secara terpadu dan terintegrasi.
5. Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal. faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal pada setiap kecamatan.
6. Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpulan Lokal.

7. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai danau dan Penyebrangan sebagai salah satu angkutan umum sungai dan Penyebrangan diwilayah Kabupaten Serang.
8. Adanya Pelimpahan Kewenangan perijinan angkutan umum dan Pelimpahan Kewenangan jaringan Trayek ke Provinsi, serta berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan jumlah angkutan umum di Kabupaten Serang semakin berkurang, sehingga perlu adanya kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari permasalahan angkutan perdesaan serta peningkatan partisipasi/peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana transportasi.
9. Tidak seimbangya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di wilayah Kabupaten serang sehingga mengakibatkan kemacetan Arus lalin terutama pada persimpangan dan pada jam jam sibuk.
10. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.
11. Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.

Dengan memperhatikan permasalahan bidang perhubungan, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam melaksanakan, merencanakan, mengatur, dan mengawasi

penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kabupaten Serang dapat dirumuskan sebagai mana tabel Berikut ini :

**Tabel 10. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Insfrastruktur Transportasi masih belum optimal	1.1. Belum Optimalnya Penyediaan dan Penataan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan	1.1.1 Belum adanya master plan transportasi yang menyeluruh dan terintegrasi. 1.1.2 Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang Lalu Lintas Angkutan Jalan. 1.1.3 Kurang Optimalnya sarana dan prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor. 1.1.4 Belum optimalnya pengembangan sistem dan manajemen perparkiran. 1.1.5 Kurang Optimalnya penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal dan ASDP
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi yang belum maksimal	2.1. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pembinaan serta Pelayanan Bidang Perhubungan.	2.1.1 Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas 2.1.2 Belum Optimalnya sumberdaya manusia sesuai dengan spesifikasi keahlian bidang perhubungan 2.1.3 Pelayanan terminal yang menjadi kewenangan kabupaten belum optimal 2.1.4 Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.1.5 berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan good governance salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (strategic vision) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan .

Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang 2021 - 2026, bahwa Visi Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG  
SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN  
DAN AGAMIS”**

Uraian makna yang terkandung dalam Visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

#### **MAJU :**

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta kemandirian masyarakat Kabupaten Serang secara berkelanjutan.

#### **SEJAHTERA :**

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah masyarakat kabupaten serang secara layak.

#### **AGAMIS :**

Perwujudan norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 maka misi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026 diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Serang selaku pengelola kebijakan dibidang perhubungan, mendukung, mempercepat dan bersinergi dengan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serang terutama mempercepat dan mendorong pada misi 3 yaitu :

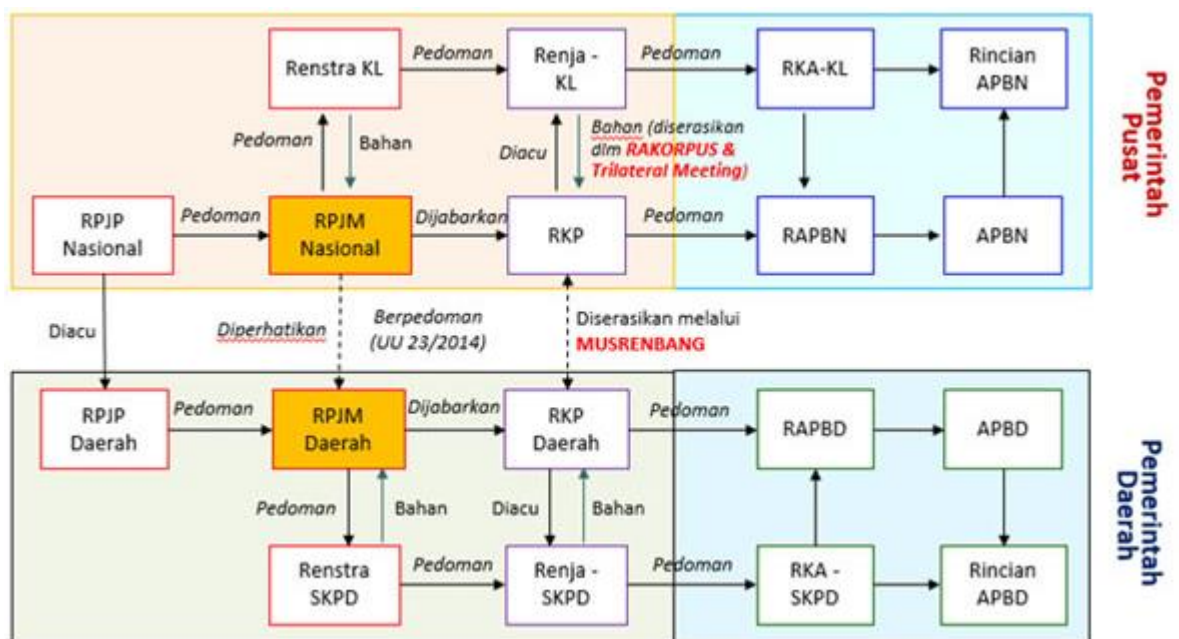
**Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas**

Keterlibatan secara langsung Dinas Perhubungan hal ini diuraikan pada **tujuan** dan **sasaran** pembangunan daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026 pada **Tujuan Misi 3 Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas** dengan **Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah.**

Keterkaitan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan untuk ketersediaan sarana, prasarana dan Fasilitas perhubungan Darat dan Laut. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang terkait dengan misi tersebut yaitu : Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan dan Melaksanakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI BANTEN

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Bersinergi dengan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra SKPD Propinsi Banten (Dinas Perhubungan Provinsi Banten). Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah :



**Gambar 2. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah**

#### 3.3.1 Renstra Kementerian Perhubungan

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan

telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

**“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”**

Uraian makna yang terkandung dalam Visi adalah :

1. **Pelayanan Perhubungan yang handal**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. **Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing**, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. **Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah**, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi

percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Misi dari Kementerian Perhubungan adalah sebagai Berikut:

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.

2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatid dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan.

Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah.

Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembinaan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan

secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kabupaten Serang.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat, Sungai, Danau dan Penyebrangan serta jenis dan mekanisme transportasi di Kabupaten Serang. yang perlu menjadi perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Wilayah Kabupaten Serang.

### **3.3.2 Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Banten**

Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan dan Sasaran yaitu :

Tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompentensi serta melayani masyarkat dengan cara :

1. Mendidik dan menyiapkan aparat Dinas Perhubungan Provinsi Banten semakin handal;
2. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Dengan sasaran meningkatnya aparatur perhubungan yang profesional dan handal.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah dengan cara :

1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali;
2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
3. Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Dengan sasaran :

1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas di wilayah Provinsi Banten;
2. Mengendalikan angkutan orang/barang di wilayah Provinsi Banten;
3. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman;
4. Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Banten, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Meningkatkan SDM di Bidang Perhubungan.
2. Meningkatkan Disiplin dan Kesadaran Masyarakat dalam ber Lalu Lintas.
3. Peningkatan pelayanan transportasi.

4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan fasilitas perhubungan.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### **3.4.1 Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Serang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031, rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Sistem perkotaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu PKL dan pusat pusat lainnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Serang meliputi:

- a. Kawasan perkotaan Anyar berada di Kecamatan Anyar;
- b. Kawasan perkotaan Baros berada di Kecamatan Baros;
- c. Kawasan perkotaan Ciruas berada di Kecamatan Ciruas dan Kecamatan Kragilan; dan
- d. Kawasan perkotaan Pontang berada di Kecamatan Pontang.

Sedangkan pusat-pusat lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang tersebar diseluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Serang.

Secara umum penataan ruang wilayah Kabupaten Serang sebagai berikut:

- a. Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing global;
- b. Pengembangan pertanian pendukung yang berkelanjutan sebagai pengembangan perekonomian kabupaten;

- c. Pengembangan pariwisata berkelanjutan bertumpu pada sumber daya alam dan budaya lokal;
- d. Pengembangan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;
- e. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;
- f. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan lingkungan;
- g. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana;
- h. Pemantapan kawasan peruntukan lindung untuk mendukung perkembangan kabupaten berkelanjutan;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan budi daya pendukung perkembangan dan pertumbuhan kabupaten sesuai daya dukung lingkungan;
- j. Penetapan dan pengembangan kawasan strategis pendukung perkembangan daerah yang merata dan berkelanjutan; dan
- k. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Selain itu Kabupaten Serang juga melakukan perencanaan mengenai sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. Pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Anyar, Kecamatan Tunjungteja, Kecamatan Petir dan Kecamatan Pamarayan
- b. Rencana terminal agropolitan di Kecamatan Waringinkurung dan Kecamatan Baros
- c. Rencana Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo
- d. Rencana pengembangan stasiun kereta api meliputi:

1. Pembangunan stasiun kereta api terpadu pada Kawasan Bojonegara di Kecamatan Pulo Ampel;
  2. Pembangunan stasiun kereta api baru Cikande di Kecamatan Cikande; dan
  3. Pengembangan dan Peningkatan fungsi stasiun, meliputi:
    - Stasiun Catang di Kecamatan Tunjungteja;
    - Stasiun Jambu Baru di Kecamatan Tunjungteja;
    - Stasiun Anyar Kidul di Kecamatan Anyar; dan
    - Stasiun Tonjong Baru di Kecamatan Kramatwatu.
- e. Rencana pembangunan sungai dan Danau sebagai Pelabuhan pengumpan meliputi:
- Pelabuhan Pontang;
  - Pelabuhan Carenang;
  - Pelabuhan Kragilan;
  - Pelabuhan Cikande; dan
  - Pelabuhan Tirtayasa
- f. Pengembangan dermaga penyeberangan lokal, meliputi:
- Dermaga Grenyang di Kecamatan Bojonegara
  - Dermaga Pulau Panjang di Kecamatan Pulo Ampel
  - Dermaga Pulau Tunda di Kecamatan Tirtayasa
  - Dermaga Lontar di Kecamatan Tirtayasa
- g. Pelabuhan Pengumpan lokal berupa Pembangunan Pelabuhan baru meliputi:
- Pelabuhan Grenyang-Pulo Ampel;
  - Pelabuhan Pasauran;
  - Pelabuhan Pulo Panjang – Pulo Ampel;
  - Pelabuhan Terate;
  - Pelabuhan Pulo Tunda Tirtayasa; dan
  - Pelabuhan Lontar - Pontang.

Hasil telaahan terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang ditunjukkan pada Tabel berikut:

**Tabel 11. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Serang**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pengembangan prasarana dan sarana transportasi kabupaten terkoneksi dengan prasarana dan sarana transportasi nasional, regional dan lokal dalam mendukung potensi wilayah;	Prasarana dan sarana transportasi kabupaten belum terkoneksi secara optimal	-	Dibutuhkan pemantapan dan pengembangan Prasarana dan sarana transportasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diwilayah Kabupaten serang guna mendukung pergerakan Transportasi di wilayah Kabupaten serang</li> <li>2. Mengembangkan terminal angkutan penumpang beserta sarana penunjang.</li> <li>3. Penataan dan peningkatan fungsi Pelabuhan Pengumpan Lokal dan ASDP</li> </ol>	Wilayah Kabupaten Serang  Kec. Pontang, Kec. Cikande, Kec. Tunjung Teja, Kec. Anyer, Kec. Pamarayan Dan Kec. Cinangka  Pulo Tunda, Pulo Panjang, Grenyang dan Lontar

### **3.4.2 Implikasi Klhs Bagi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang**

Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yaitu tetap mengacu kepada pengaturan Rencana Pola Pemanfaatan Ruang yaitu terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan cara :

- Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang.;
- Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar
- penanganan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh

Dinas Perhubungan melakukan program dan kegiatan yang dapat mendukung Rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu pada rekomendasi KLHS terkait uji kendaraan secara berkala, rekayasa lalu lintas, optimasi angkutan umum, peningkatan mutu angkutan perdesaan, penambahan moda transportasi, sosialisasi berkala mengenai angkutan umum, peningkatan kendaraan umum perdesaan, dan peraturan perhubungan.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Mencermati isu-isu Strategis di bidang transportasi yang sedang mengemuka berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari

beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Serang selama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Peningkatan SDM di Bidang Perhubungan
- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Transportasi
- Pengembangan dan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana jalan
- Peningkatan mobilitas penduduk diwilayah Kabupaten Serang
- Peningkatan manajemen kebutuhan lalu-lintas
- Peningkatan keselamatan berlalu-lintas

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

##### 4.1.1 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Serang serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Banten, Telaahaan terhadap RTRW dan KLHS Kabupaten Serang sebagaimana dituangkan pada Bab III, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang untuk periode tahun 2021-2026.

Rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021–2026 adalah :

**“Meningkatkan pemerataan pembangunan  
Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang  
Berwawasan Lingkungan”**

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah :

**“Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur  
Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar  
Wilayah”**

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 12. Indikator Sasaran pada Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT), PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4							
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan									
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	96,1	100	100	100	100	100
			- Persentase layanan angkutan darat	%	13,19	13,43	13,66	13,89	14,12	14,35
			- Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	%	25	25	25	25	25	25
			- Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	%	20	20	20	20	20	20
			- Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

##### 4.3.1 Strategi

Strategi pembangunan sektor transportasi merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai landasan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Strategi pembangunan sektor transportasi dirumuskan dengan memperhatikan lingkungan strategik yang berpengaruh seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan mata transportasi , sumber daya aparatur dan dukungan dari stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil untuk pembangunan dan pengembangan urusan transportasi di wilayah Kabupaten Serang.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah :

1. Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan
2. Meningkatkan Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU) di Wilayah Kabupaten Serang
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana LLAJ

4. Meningkatkan angkutan umum yang laik jalan
5. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Arus Lalin di persimpangan
6. Meningkatkan fungsi Sarana dan Prasarana pelabuhan pengumpan Lokal
7. Meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas
8. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan

Strategi cara mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam program program, antara lain :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ).
2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN.
3. PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN.
4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN.

#### **4.3.2 Kebijakan**

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional dari Presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan transportasi dalam kurun waktu 2020-2024 yaitu mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkeselamatan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa transportasi merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat

dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Mewujudkan Visi Kabupaten serang yaitu "TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS", Dinas Perhubungan kabupaten serang menetapkan tujuan yang mendukung terwujudnya Misi Ke-III yaitu "Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas" melalui sasaran peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur Perhubungan dan Aksesibilitas antar wilayah yang berkeselamatan. Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 13. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD**

<b>VISI :</b> <b>Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis</b>			
<b>MISI III :</b> <b>Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Kawasan dan Daerah serta Aksesibilitas antar Wilayah	Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan</li> <li>– Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ</li> <li>– Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ</li> <li>– Peningkatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>– Peningkatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang</li> <li>– Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>– Peningkatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> </ul>

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

**VISI :**

**Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis**

**MISI III :**

**Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan fasilitas perhubungan serta ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan umum</li> <li>- Meningkatkan ketersediaan, kualitas, manajemen angkutan Penyebrangan dan kepelabuhanan</li> <li>- Meningkatkan Fasilitas Perlengkapan Jalan (PJU) di Wilayah Kabupaten Serang</li> <li>- Meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas</li> <li>- Meningkatkan Kinerja Pelayanan Bidang Perhubungan</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF PER SUB KEGIATAN**

#### **5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Juga mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi yang dicanangkan Kepala Daerah Kabupaten Serang.

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2021 - 2026 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 sebanyak 5 Program Yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
  - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
    - Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal
    - Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
    - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
  - 3) Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
    - Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
  - 4) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 6) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 7) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 8) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 9) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 10) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 11) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
3. Program Pengelolaan Pelayaran yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
    - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - 3) Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
    - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
  - 4) Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
    - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
    - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
4. Program Pengelolaan Penerbangan yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
    - Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
5. Program Pengelolaan Perkeretaapian yang terdiri dari :
- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

- 2) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

**Tabel 14. Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025									
												2021		2022		2023		2024		2025		2026											
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp						
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	2	1	0	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Presentase Tingkat kapasitas kelembagaan dan tata kelola Perangkat daerah	100%	100	%	7.740.367.684	100	%	11.864.910.812	100	%	11.088.990.812	100	%	11.994.990.812	100	%	12.116.408.542	100	%	12.345.508.542	600	%	67.151.177.204	
		2	1	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%		
		2	1	0	1	2	0	1	Sebelum	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD	4 Dokumen	4	Dokumen	120.000.000	4	dokumen	150.000.000	4	Dokumen	150.000.000	4	dokumen	150.000.000	4	dokumen	150.000.000	4	dokumen	150.000.000	24	dokumen	870.000.000
									Sesudah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4	Dokumen		4	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		24	dokumen	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2	1601	201	06		Sebelum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	1 Dokumen	2	Dokumen	200.000.000	2	dokumen	200.000.000	2	Dokumen	200.000.000	2	dokumen	200.000.000	2	dokumen	200.000.000	12	dokumen	1.200.000.000
							Sesudah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		2	Laporan		12	Laporan	
		2	1601	201	07		Sebelum	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	65.000.000	4	Dokumen	125.000.000	4	dokumen	150.000.000	4	dokumen	150.000.000	20	dokumen	690.000.000
							Sesudah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	Laporan		3	Laporan		4	Laporan		4	Laporan		4	Laporan		20	Laporan	
		2	1601	202				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%	
		2	1601	202	04		Sebelum	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12	Bulan	222.684.000	12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	350.000.000	72	Bulan	1.972.684.000
							Sesudah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		12	Dokumen	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
												2021		2022		2023		2024		2025		2026										
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp				
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Tersedianya pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3	Dokumen	29.999.900	3	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	50.000.000	3	Dokumen	50.000.000	18	Dokumen	279.999.900
								Sesudah		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Laporan	3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		18	Laporan	
		2	1	0	2	0	3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terseleenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%	
		2	1	0	2	0	2	Sebelum	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Asuransi BMD dan Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	12	Bulan	309.445.600	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	12	Bulan	450.000.000	72	Bulan	2.559.445.600
								Sesudah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	6	Dokumen		6	Dokumen		6	Dokumen		6	Dokumen		6	Dokumen		6	Dokumen		36	Dokumen	
		2	1	0	2	0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025					
												2021		2022		2023		2024		2025		2026							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Stell	50	Stell	400.000.000	50	Stell	400.000.000	50	Stell	400.000.000	50	Stell	400.000.000	50	Stell	400.000.000	3.000	Stell	2.400.000.000
								Sudah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket		2	Paket	
		2	1	0	2	0	0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	10	%		10	%		10	%		10	%		10	%		600	%	
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	12	Bulan	30.000.000	12	Bulan	30.000.000	12	Bulan	30.000.000	12	Bulan	30.000.000	12	Bulan	30.000.000	72	Bulan	180.000.000
								Sudah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket	
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12	Bulan	550.000.000	12	Bulan	550.000.000	12	Bulan	550.000.000	12	Bulan	550.000.000	12	Bulan	550.000.000	72	Bulan	3.300.000.000
								Sudah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket	
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor	12 Bulan	12	Bulan	500.000.000	12	Bulan	500.000.000	12	Bulan	500.000.000	12	Bulan	500.000.000	12	Bulan	500.000.000	72	Bulan	3.000.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025					
												2021		2022		2023		2024		2025		2026							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
								Sudah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		6	Paket		
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	72	Bulan	600.000.000
								Sudah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		1	Paket		6	Paket		
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 Bulan	12	Bulan	48.468.800	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	12	Bulan	100.000.000	72	Bulan	548.468.800
								Sudah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		12	Dokumen		
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minum untuk rapat dan tamu	12 Bulan	12	Bulan		12	Bulan	505.360.037	12	Bulan	505.360.037	12	Bulan	605.360.037	12	Bulan	615.360.037	72	Bulan	2.846.800.185
								Sudah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen		3	Dokumen		18	Bulan		
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1	Tahun	993.740.000	1	Tahun	1.210.000.000	1	Tahun	1.210.000.000	1	Tahun	1.210.000.000	1	Tahun	1.210.000.000	6	Tahun	7.043.740.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
							Sudah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	900	Laporan								
		2	16	01	207			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
		2	16	01	207	02	Sebelum	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas operasional/lapangan	Unit	1	Unit	801.999.800	1	Unit	1.004.760.000	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	2	Unit	1.806.759.800						
							Sudah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Unit	1	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	2	Unit								
		2	16	01	207	06	Sebelum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	16	Unit	127.172.968	16	Unit	554.802.270	16	Unit	554.802.270	16	Unit	614.802.270	16	Unit	630.850.000	16	Unit	650.850.000	96	Unit	3.133.279.778
							Sudah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	96	Unit						
		2	16	01	207	11	Sebelum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pendukung sarana prasarana gedung kantor	Unit	6	Unit	50.002.286	6	Unit	507.700.000	6	Unit	507.700.000	6	Unit	520.700.000	6	Unit	550.070.000	6	Unit	570.170.000	36	Unit	2.706.342.286

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
								Sesudah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	36	Unit			
		2	16	01	208				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%			
		2	16	01	208	01	Sebelum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat dan pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	12	Bulan	153.360.000	12	Bulan	153.360.000	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	250.000.000	12	Bulan	250.000.000	72	Bulan	1.306.720.000
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	12.000	Laporan	
		2	16	01	208	02	Sebelum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, Advetorial dan PABX Gedung kantor	12 Bulan	12	Bulan	809.018.000	12	Bulan	940.000.000	12	Bulan	940.000.000	12	Bulan	940.000.000	12	Bulan	940.000.000	72	Bulan	5.509.018.000
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan	
		2	16	01	208	04	Sebelum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 Bulan	12	Bulan	127.800.000	12	Bulan	127.800.000	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	200.000.000	12	Bulan	200.000.000	72	Bulan	1.055.600.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021			2022			2023			2024					2025			2026			
											Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp				Target	Rp		Target	Rp		
							Sesudah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		72	Laporan		
		2	16	01	209			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%	
		2	16	01	209	01	Sebelum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	12 Bulan	12	Bulan	263.419.334	12	Bulan	607.426.560	12	Bulan	607.426.560	12	Bulan	807.426.560	12	Bulan	807.426.560	12	Bulan	807.426.560	72	Bulan	3.900.552.134
							Sesudah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21	Unit		21	Unit		21	Unit		21	Unit		21	Unit		21	Unit		126	Unit		
		2	16	01	209	02	Sebelum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	12 Bulan	12	Bulan	1.095.110.228	12	Bulan	1.501.450.840	12	Bulan	1.501.450.840	12	Bulan	1.701.450.840	12	Bulan	1.701.450.840	12	Bulan	1.956.450.840	72	Bulan	9.457.364.428

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
												2021		2022		2023		2024		2025		2026										
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
								Sesudah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	378	Unit								
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor	12 Bulan	12	Bulan	327.641.000	12	Bulan	554.700.265	12	Bulan	554.700.265	12	Bulan	654.700.265	12	Bulan	654.700.265	72	Bulan	3.467.142.325			
								Sesudah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	1.200	Unit						
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	12	Bulan	430.505.768	12	Bulan	1.252.550.840	12	Bulan	1.252.550.840	12	Bulan	1.460.550.840	12	Bulan	1.460.550.840	72	Bulan	7.317.259.968			
								Sesudah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	30	Unit						
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	2	1	0	2	0	0		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13	%	36.059.748.124	13	%	43.646.063.066	14	%	42.649.874.972	14	%	54.701.570.600	14	%	51.614.784.205	14	%	53.068.367.291	82	%	281.540.408.258

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	15	02	201		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%								
		2	15	02	201	01	Sebelum	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk yang disusun	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	450.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2	Dokumen	650.000.000				
							Sesudah		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		2	Dokumen					
		2	15	02	201	02	Sebelum	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	-	1	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	2	Dokumen	350.000.000			
							Sesudah		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		2	Dokumen				
		2	15	02	201	03	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya forum lalulintas	Kegiatan		Kegiatan	-	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	5.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	5	Kegiatan	205.000.000
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Laporan	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	1	0	2	2	0	2	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%								
		2	1	0	2	2	0	1	Sebelum	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah prasarana jalan yang terbangun	21 Unit	Unit	-	Unit	-	3	Unit	600.000.000	5	Unit	500.000.000	5	Unit	500.000.000	5	Unit	500.000.000	18	Unit	2.100.000.000
									Sesudah		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	21 Unit	Unit		Unit	3	Unit		5	Unit		5	Unit		5	Unit		18	Unit		
		2	1	0	2	2	0	2	Sebelum	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan (PJU) yang terbangun	2576 unit	450 Unit	10.630.199.380	450 Unit	13.341.081.000	450 Unit	13.341.081.000	450 Unit	13.341.081.000	450 Unit	13.341.081.000	450 Unit	13.341.081.000	2,700	Unit	77.335.604.380				
									Sesudah		Jumlah Perengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2576 unit	450 Unit		450 Unit		450 Unit		450 Unit		450 Unit		450 Unit		450 Unit		2,700	Unit			
		2	1	0	2	2	0	3	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan terpelihara	Unit	Unit	-	15 Unit	650.080.000	17 Unit	665.080.000	20 Unit	680.080.000	23 Unit	695.080.000	25 Unit	710.080.000	100	Unit	3.400.400.000				
									Sesudah		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Unit		15 Unit		17 Unit		20 Unit		23 Unit		25 Unit		100	Unit					
		2	1	0	2	2	0	4	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	jumlah unit perengkapan jalan (PJU) terpelihara	800 Unit	80 Unit	15.000.000.000	80 Unit	15.000.000.000	80 Unit	15.000.000.000	80 Unit	15.000.000.000	80 Unit	15.000.000.000	80 Unit	15.000.000.000	4,800	Unit	90.000.000.000				

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025						
												2021		2022		2023		2024		2025		2026								
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
								Sudah	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	4.800	Unit						
		2	15	02	203				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%					
		2	15	02	203	01	Sebelum	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen	200.000.000		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen					
								Sudah	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen			Dokumen		Dokumen		1	Dokumen					
		2	15	02	203	02	Sebelum	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Yang terbangun	1 Terminal		Terminal		Terminal		2	Lahan Terminal	9.000.000.000	1	Terminal	5.000.000.000	1	Terminal	5.000.000.000	4	Terminal	19.000.000.000			
								Sudah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		Unit		Unit		2	Lahan Terminal		1	Unit		1	Unit		4	Unit				
		2	15	02	203	03	Sebelum	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana terminal yang terbangun	Unit		Unit	1	Unit	150.000.000	1	Unit	250.000.000	1	Unit	300.000.000	1	Unit	350.000.000	1	Unit	400.000.000	5	Unit	1.450.000.000
								Sudah	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit		Unit	1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		5	Unit				

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
												2021		2022		2023		2024		2025		2026										
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional	4 Terminal	4	Terminal	728.750.000	4	Terminal	1.058.450.000	4	Terminal	1.058.450.000	4	Terminal	1.158.450.000	4	Terminal	1.258.450.000	4	Terminal	1.358.450.000	24	Terminal	6.621.000.000
								Sesudah		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		24	Unit	
		2	1	0	2	0	0		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang																					
		2	1	0	2	0	0		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		600	%	
		2	1	0	2	0	0	Sebelum	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah tempat parkir yang tersedia	9 Lokasi		Lokasi	-	9	Lokasi	63.000.000	9	Lokasi	66.150.000	10	Lokasi	69.450.000	11	Lokasi	72.930.000	12	Lokasi	76.570.000	51	Lokasi	348.100.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025						
											2021		2022		2023		2024		2025		2026								
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
							Sudah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	20	Dokumen					
		2	15	02	204	02	Sebelum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah petugas parkir yang terbina	116 orang	116 orang	294.970.000	116 orang	691.940.000	116 orang	726.500.000	116 orang	762.800.000	116 orang	801.000.000	116 orang	841.000.000	696	orang	4.118.210.000				
							Sudah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan				
		2	15	02	205			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		600	%					
		2	15	02	205	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia	Unit	Unit	1	Unit	200.000.000	1	Unit	300.000.000	1	Unit	400.000.000	1	Unit	600.000.000	1	Unit	800.000.000	5	Unit	2.300.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025						
												2021		2022		2023		2024		2025		2026								
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
		2	1	0	2.	0		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga penguji yang tersedia	7 Orang	Orang		1	Orang	100.000.000	1	Orang	100.000.000	1	Orang	100.000.000	1	Orang	100.000.000	1	Orang	100.000.000	5	Orang	500.000.000
		2	1	0	2.	0	<b>Sebelum</b>	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Angkutan yang lulus Uji	9000 Kendaraan	9000 Kendar aan	186.820.000	1000	Kendar aan	250.000.000	1100	Kendar aan	275.000.000	1200	Kendar aan	300.000.000	1300	Kendar aan	325.000.000	1400	Kendar aan	350.000.000	6900	Kendar aan	1.686.820.000
							<b>Sudah</b>		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9000 Unit	9000 Unit		1000	Unit		1100	Unit		1200	Unit		1300	Unit		1400	Unit		6900	Unit	
		2	1	0	2.	0	<b>Sebelum</b>	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia	9000 Buku Uji	10000 Buku Uji	438.000.000	1100	Buku Uji	500.000.000	1200	Buku Uji	525.000.000	1300	Buku Uji	550.000.000	1400	Buku Uji	575.000.000	1500	Buku Uji	600.000.000	7500	Buku Uji	3.188.000.000
							<b>Sudah</b>		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9000 Dokumen	10000 Dokum en		1100	Dokum en		1200	Dokum en		1300	Dokum en		1400	Dokum en		1500	Dokum en			Dokum en	
		2	1	0	2.	0	<b>Sebelum</b>	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kegiatan		1	Kegiata n	100.000.000	1	Kegiata n	100.000.000	1	Kegiata n	100.000.000	1	Kegiata n	100.000.000	1	Kegiata n	100.000.000	5	Kegiata n	500.000.000	
							<b>Sudah</b>		Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Lapora n		1	Lapora n		1	Lapora n		1	Lapora n		1	Lapora n		1	Lapora n		5	Lapora n	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025							
											2021		2022		2023		2024		2025		2026									
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
		2	15	02	205	06	Sebelum	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi PKB	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	100.000.000	5	Dokumen	500.000.000
							Sesudah	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan		Laporan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Laporan	
		2	15	02	205	07	Sebelum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	494.000.000	9 Unit	9 Unit	690.000.000	9 Unit	9 Unit	700.000.000	9 Unit	9 Unit	725.000.000	9 Unit	9 Unit	750.000.000	9 Unit	9 Unit	800.000.000	54	Unit	4.159.000.000
							Sesudah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit		9 Unit	9 Unit		54	Unit	
		2	15	02	205	08	Sebelum	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi terkait pengujian	Kali	Kali		12 Kali	12 Kali	120.000.000	12 Kali	12 Kali	120.000.000	12 Kali	12 Kali	120.000.000	12 Kali	12 Kali	120.000.000	12 Kali	12 Kali	120.000.000	60	Kali	600.000.000
							Sesudah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		60	Laporan	
		2	15	02	205	09	Sebelum	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan yang tersedia	Perda	Perda		Perda	Perda		Perda	Perda		Perda	Perda		1 Perda	1 Perda	200.000.000	Perda	Perda		1	Perda	200.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
												2021		2022		2023		2024		2025		2026					
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
								Sesudah		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan		Laporan		1	Laporan		
		2	15	02	205	10	Sebelum	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Monev Penyelenggaraan PKB	Kegiatan		Kegiatan	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	5	Kegiatan	50.000.000
								Sesudah		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		5	Laporan	
		2	15	02	206				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan		19	Kegiatan		
		2	15	02	206	01	Sebelum	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah simpang terbit lalu lintas yang tertangani	21 titik lokasi	21 titik lokasi	839.530.500	21 titik lokasi	1.495.326.300	21 titik lokasi	1.565.326.300	21 titik lokasi	1.615.326.300	21 titik lokasi	1.665.326.300	21 titik lokasi	1.725.326.300	126 titik lokasi	126 titik lokasi	8.906.162.000		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025										
											2021		2022		2023		2024		2025		2026												
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp							
								Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		11	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		71	Laporan							
		2	15	02	206	02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan	5	Jenis	5	Jenis	5.297.526.994	5	Jenis	5.187.998.726	5	Jenis	3.661.300.632	5	Jenis	5.250.000.000	5	Jenis	5.500.000.000	5	Jenis	5.750.000.000	30	Jenis	30.646.826.352	
		2	15	02	206	03	Sebelum	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan uji coba dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	-	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	3	Kegiatan	150.000.000		
							Sesudah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Dokumen	Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		3	Dokumen			
		2	15	02	206	05	Sebelum	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	1	Kegiatan	50.000.000	4	Kegiatan	200.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
								Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan		Laporan	1	Laporan		Laporan	1	Laporan		Laporan	4	Laporan				
		2	15	02	207		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<b>Terseleenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten</b>	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%						
		2	15	02	207	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang bersertifikasi penilai andalalin	Orang		Orang	-	Orang	-	Orang	1	Orang	35.000.000	Orang	1	Orang	35.000.000	Orang	1	Orang	35.000.000	3	Orang	105.000.000		
								Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		Orang		Orang		Orang	1	Orang		Orang	1	Orang		Orang	1	Orang	3	Orang				
		2	15	02	207	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin	Rekomendasi		Rekomendasi	-	Rekomendasi	-	Rekomendasi	10	Rekomendasi	20.000.000	Rekomendasi	10	Rekomendasi	20.000.000	Rekomendasi	10	Rekomendasi	20.000.000	30	Rekomendasi	60.000.000		
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	10	Laporan		Laporan	10	Laporan		Laporan	10	Laporan	30	Laporan				
		2	15	02	207	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Laporan		Laporan	-	Laporan	12	Laporan	30.000.000	Laporan	12	Laporan	30.000.000	Laporan	12	Laporan	30.000.000	Laporan	12	Laporan	30.000.000	60	Laporan	600.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
							Sudah	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	60	Laporan							
		2	15	02	208			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
		2	15	02	208	01	Sebelum	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pengembangan Personil LLAJ	Kegiatan	1	Kegiatan	314.279.000	1	Kegiatan	375.504.000	1	Kegiatan	375.504.000	1	Kegiatan	394.279.000	1	Kegiatan	413.993.000	1	Kegiatan	434.692.000	6	Kegiatan	2.308.251.000
							Sudah	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	3	Orang	15	Orang							
		2	15	02	208	02	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Kegiatan	1	Kegiatan	125.814.500	1	Kegiatan	158.040.000	1	Kegiatan	158.040.000	1	Kegiatan	189.648.000	1	Kegiatan	227.577.000	1	Kegiatan	273.093.000	6	Kegiatan	1.132.212.500
							Sudah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	66	Laporan					

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025		2026										
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
		2	15	02	208	03	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya kegiatan pemantauan terminal	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	83.160.000	1	Kegiatan	83.160.000	1	Kegiatan	99.792.000	1	Kegiatan	119.750.000	1	Kegiatan	143.700.000	5	Kegiatan	529.562.000	
							Sesudah		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	-	Laporan	11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		55	Laporan		
		2	15	02	208	04	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sistem manajemen keselamatan lalu lintas	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	348.580.000	1	Kegiatan	348.580.000	1	Kegiatan	418.296.000	1	Kegiatan	501.955.000	1	Kegiatan	602.346.000	5	Kegiatan	2.219.757.000	
							Sesudah		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		3	Laporan		15	Laporan		
		2	15	02	209			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	100%	%	600	%			
		2	15	02	209	01	Sebelum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Perintis pedesaan yang beroperasi	6 Unit	6	Unit	533.073.450	6	Unit	712.577.840	6	Unit	727.577.840	6	Unit	890.722.300	6	Unit	1.202.475.105	6	Unit	1.623.341.391	36	Unit	5.689.767.926

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
												2021		2022		2023		2024		2025		2026										
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
								Sudah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	53 Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	318	Unit								
		2	1	0	2	2	0	Sebelum	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban angkutan umum di jalan	168 kali	16	Kali	925.664.300	16	Kali	1.053.484.400	16	Kali	1.181.284.400	16	Kali	1.309.084.400	16	Kali	1.436.884.400	16	Kali	1.564.684.400	100	Kali	7.471.086.300
								Sudah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		11	Laporan		66	Laporan		
		2	1	0	2	2	1		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		5	Kegiatan	
		2	1	0	2	2	0	Sebelum	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kali		Kali		1	Kali	300.000.000	1	Kali	300.000.000	1	Kali	300.000.000	1	Kali	300.000.000	1	Kali	300.000.000	5	Kali	1.500.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
												2021		2022		2023		2024		2025		2026										
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
								Sesudah	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	5	Dokumen						
		2	1	0	2	2	1		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%							
		2	1	0	2	2	1	Sebelum	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi izin	66 rekomendasi	100	rekomendasi	51.120.000	100	rekomendasi	76.840.800	100	rekomendasi	76.840.800	100	rekomendasi	102.561.600	100	rekomendasi	128.282.400	100	rekomendasi	154.003.200	600	rekomendasi	589.648.800
								Sesudah	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan	66 Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	100	Laporan	600	Laporan					

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
											2021		2022		2023		2024		2025		2026						
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
		2	15	02	2,16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0%	-	%	-	%	-	%	100	%	100	%	100	%	300	%				
		2	15	02	2,16	01	Sebelum	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	10.000.000	Kegiatan	-	Kegiatan	-	1	Kegiatan	10.000.000	2	Kegiatan	20.000.000
							Sesudah	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	2	Dokumen	-
		2	15	02	2,16	02	Sebelum	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diluncurkan	Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	15.000.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	15.000.000	2	Dokumen	30.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025		2026						
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
								Sesudah	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen			1	Dokumen	Dokumen			Dokumen			1	Dokumen			2	Dokumen	
		2	15	02	216	03		Sebelum	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	Kegiatan	-		1	Kegiatan	30.000.000	1	Kegiatan	30.000.000	1	Kegiatan	30.000.000	1	Kegiatan	30.000.000	4	Kegiatan	120.000.000
								Sesudah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan			1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		1	Laporan		4	Laporan	
		2	15	03					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0%	25 %	1.197.518.750	25 %	2.156.525.000	25 %	2.448.859.000	25 %	5.010.339.000	25 %	8.200.859.000	25 %	2.753.859.000	150 %		21.767.959.750		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025		
											2021		2022		2023		2024		2025		2026				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		2	15	03	207		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%		
		2	15	03	207	01	Sebelum	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengumpulan & Analisis Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Dokumen	1 Dokumen	156.805.000	1 Dokumen	252.305.000	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	250.000.000	6 Dokumen	1.249.110.000	
							Sesudah	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72 Dokumen	Dokumen		
		2	15	03	210		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%
		2	15	03	210	03	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal/Dermaga	Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal/Dermaga	Dermaga / pelabuhan	Dermaga / pelabuhan	3 Dermaga / pelabuhan	428.859.000	3 Dermaga / pelabuhan	628.859.000	3 Dermaga / pelabuhan	628.859.000	3 Dermaga / pelabuhan	628.859.000	3 Dermaga / pelabuhan	628.859.000	3 Dermaga / pelabuhan	628.859.000	15 Dermaga / pelabuhan	2.944.295.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Sesudah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Laporan	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	60	Laporan
		2	1	0	2.				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	1	0	2.	0	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)	1 Lokasi	1 Lokasi	721.633.750	1 Lokasi	578.781.000	1 Lokasi	600.000.000	1 Lokasi	630.000.000	1 Lokasi	650.000.000	1 Lokasi	675.000.000	6 Lokasi	3.855.414.750	
								Sesudah	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72 Laporan	Laporan	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025						
											2021		2022		2023		2024		2025		2026								
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
		2	1	0	2.		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%						
		2	1	0	2.	0	Sebelum	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terbangun	Unit				1	Dokumen	100.000.000	1	Lahan Pelabuhan	2.501.480.000	1	Unit	5.552.000.000	Unit	1	Unit	8.153.480.000			
							Sudah			Unit											1	Unit	Unit	1	Unit				
		2	1	0	2.	0	Sebelum	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terpelihara	Derma ga / pelabuhan	Derma ga / pelabuhan	3	Derma ga / pelabuhan	300.000.000	3	Derma ga / pelabuhan	350.000.000	3	Derma ga / pelabuhan	350.000.000	3	Derma ga / pelabuhan	350.000.000	3	Derma ga / pelabuhan	350.000.000	15	Derma ga / pelabuhan	1.700.000.000
							Sudah		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	15	Unit				

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025							
												2021		2022		2023		2024		2025		2026									
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
		2	1	0	2.	0	<b>Sebelum</b>	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	berfungsinya kapal patroli unruk pengawasan dan pengoperasian pelabuhan/dermaga	2 Unit	2	Unit	319.080.000	2	Unit	596.580.000	2	Unit	600.000.000	2	Unit	700.000.000	2	Unit	800.000.000	2	Unit	850.000.000	12	Unit	3.865.660.000
							<b>Sesudah</b>		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		12	Laporan		72	Laporan	
		2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memiliki izin	0%	-	%	0	20	%	100.000.000	20	%	110.000.000	20	%	110.000.000	20	%	100.000.000	20	%	100.000.000	100	%	520.000.000
		2	1	0	2.			Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0 Kegiatan	0	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		1	Kegiatan		5	Kegiatan	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025							
											2021		2022		2023		2024		2025		2026									
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp				
		2	15	04	201	01	Sebelum	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kegiatan	Kegiatan	0	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	110.000.000	1	Kegiatan	110.000.000	1	Kegiatan	100.000.000	1	Kegiatan	100.000.000	5	Kegiatan	520.000.000
							Sesudah	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	5	Dokumen		
		2	15	05				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin	0%	%	0	50	%	613.440.000	50	%	1.163.440.000	50	%	813.440.000	50	%	613.440.000	50	%	613.440.000	250	%	3.717.200.000
		2	15	05	201		Sebelum	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan			
		2	15	05	201	01	Sesudah	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	550.000.000		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	550.000.000	

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025					
											2021		2022		2023		2024		2025		2026							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen		Dokumen			1	Dokumen			Dokumen			Dokumen			1	Dokumen			
		2	15	05	202		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	0 Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan			
		2	15	05	202	02	<b>Sebelum</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pengawasan pelaksanaan perkeretaapian	4 Perlintasan	4	Perlintasan	4	Perlintasan	613.440.000	4	Perlintasan	613.440.000	4	Perlintasan	613.440.000	4	Perlintasan	613.440.000	4	Perlintasan	24	Perlintasan	<b>3.067.200.000</b>

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								Sesudah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	60	Laporan
		2	1	0	2.				Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan
		2	1	0	2.	0		Sebelum	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	100.000.000	100.000.000

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025	
												2021		2022		2023		2024		2025		2026			
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	1	0	2	0	0	Sesudah		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	100.000.000	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **7.1. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan matriks 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab IV, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang mendukung sasaran RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 dapat dilihat sesuai tabel dibawah ini.

**Tabel 15. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	96,1%	96,1%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13%	13%	14%	14%	14%	14%	14%	14%

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENC.	TARGET KINERJA						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Program Pengelolaan Penerbangan	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas heliport yang memiliki izin	0	0	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin	0	0	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

## **7.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja memuat Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, Eselon II dengan Eselon III dan Eselon III dengan Eselon IV serta Target Indikator Kinerja yang ingin dicapai dengan uraian sebagai berikut :

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) = IKI KEPALA DINAS**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	96,1	100	100	100	100	100

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKERTARIS**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan OPD	80	81	82	83	84	85

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2	2	2	2
7	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3	3	3	3	3	3

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	150	150	150	150	150
9	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	1				
10	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	16	16	16	16	16
11	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	6	6	6	6	6
12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000	2000	2000	2000	2000	2000
13	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	12	12
15	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	21	21	21	21	21
16	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63	63	63	63	63	63
17	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200	200	200	200	200	200
18	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	5	5	5	5	5	5

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2	2	2	2
3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	3	3	3	3	3
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3	3	3	3	3

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SUB BAGIAN KEUANGAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2	2	2	2	2	2
2	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	12	12

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG LALU LINTAS JALAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tingkat Pemenuhan ketersediaan sarana, fasilitas dan manajemen rekayasa lalu lintas (%)	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan yang tersedia (%)	100	100	100	100	100	100

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI REKAYASA LALU LINTAS**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			3	5	5	5
2	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		15	17	20	23	25
3	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan (Jenis)	5	5	5	5	5	5

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	450	450	450	450	450	450
2	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800	800	800	800	800	800

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1				
2	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ		1	1			
3	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1	1	1
4	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1	1	1
5	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10	10	10
6	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		12	12	12	12	12

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG ANGKUTAN JALAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase layanan angkutan darat	12,96	13,19	13,43	13,66	13,89	14,12
2	Persentase Simpang tertib lalu lintas yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Pemenuhan angkutan umum Perdesaan(%)	100	100	100	100	100	100

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI TERMINAL**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				2		
2	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				2 Lahan Terminal	1	1
3	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		1	1	1	1	1
4	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	4	4	4	4	4	4

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI ANGKUTAN JALAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	53	53	53	53	53	53
2	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota		1	1	1	1	1
3	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1			1

5	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1			1
6	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	1	1	1
7	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						

### **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	11	11	11	11	11	11
2	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11	12	12	12	12	12

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG KESELAMATAN JALAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kendaraan umum yang lulus uji	95	96	97	98	99	100
2	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	100	100	100	100	100
3	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin			50	50	50	50

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia (Unit)		1	1	1	1	1
2	Jumlah tenaga penguji yang tersedia (Org)		1	1	1	1	1
3	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9000	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
4	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
5	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		1	1	1	1	1
6	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji		1	1	1	1	1
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	9	9	9	9	9

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

8	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	12	12	12	12
9	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1	
10	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	1	1	1	1

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI SEKSI KESELAMATAN LLJ DAN PERKERETAAPIAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya			3	3	3	3
2	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	11	11	11	11	11	11
3	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		11	11	11	11	11
4	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		3	3	3	3	3
5	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			1			
6	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			12	12	12	12
7	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan				1		

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026**

	Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota						
--	---	--	--	--	--	--	--

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI PARKIR**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		4	4	4	4	4
2	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12	12

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI BIDANG PELAYARAN DAN PENERBANGAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut		25	25	25	25	25
2	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin		20	20	20	20	20

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI ASDP**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	12	12	12	12	12
2	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	12	12	12	12	12	12

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI SEKSI ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHANAN**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		12	12	12	12	12
2	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terbangun					1	
3	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		3	3	3	3	3

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU = IKI SEKSI MANAJEMEN TRANSPORTASI LAUT DAN  
MANAJEMEN TRANSPORTASI UDARA**

No	Indikator Kinerja	Target tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2	2	2	2	2	2
2	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan			1	1	1	1

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

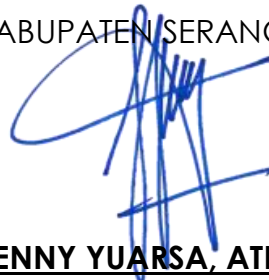
Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Dokumen Rencana Strategis ini menguraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang 2021-2026 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Renja) Tahun 2021 s/d 2026 dan menjadi acuan bagi Unit Kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 sampai tahun 2026.
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 s/d 2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 s/d 2026 khususnya sektor perhubungan.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Kerja unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, masing-masing unit kerja dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang (Renja) Tahun 2021 s/d 2026.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk Menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang lebih baik.

Serang,       Desember 2022  
KEPALA   DINAS   PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SERANG



**BENNY YUARSA, ATD, M.Si**  
NIP. 19670909 199103 1 005

## **LAMPIRAN**

## Tabel Target Kinerja

## Tabel Kerangka Pendanaan

**Lampiran I**  
**Perubahan Target Kinerja Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian												Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025							
											2021		2022		2023		2024		2025		2026									
											Target		Target		Target		Target		Target		Target				Target					
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan OPD	2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase Tingkat kapasitas kelembagaan dan tata kelola Perangkat daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%						
										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%				
									Sebelum	Penyusunan Dokumen perencanaan kerja SKPD Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD	4 Dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	24	dokumen		
									Sesudah			4 Dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	24	dokumen		
									Sebelum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya pelaporan kinerja SKPD	1 Dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	Dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	2	dokumen	12	dokumen		
									Sesudah			1 Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	12	Laporan		
							Sebelum	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1	Dokumen	3	Dokumen	4	Dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	4	dokumen	20	dokumen				
							Sesudah			1 Laporan	1	Laporan	3	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	20	Laporan				
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%						
							Sebelum	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan SKPD	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan				
							Sesudah			2 Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	12	Dokumen				
							Sebelum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya pelaporan keuangan SKPD	3 Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	18	Dokumen				

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2025				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	
							Sesudah		Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	18	Laporan		
		2	16	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	16	01	2.03	02	Sebelum	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Asuransi BMD dan Tenaga Keamanan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
							Sesudah		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	36	Dokumen		
		2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	16	01	2.05	02	Sebelum	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Stell	500	Stell	500	Stell	500	Stell	500	Stell	500	Stell	500	Stell	3.000	Stell	
							Sesudah		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	2	Paket	12	Paket	
		2	16	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	16	01	2.06	01	Sebelum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat listrik dan penerangan kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
							Sesudah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket
		2	16	01	2.06	02	Sebelum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
							Sesudah		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket
		2	16	01	2.06	04	Sebelum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
							Sesudah		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket
		2	16	01	2.06	05	Sebelum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
							Sesudah		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	6	Paket
		2	16	01	2.06	06	Sebelum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025				2026		
												Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	
								Sesudah		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	12	Dokumen	
		2	16	01	2.06	08	Sebelum	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minum untuk rapat dan tamu	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan		
								Sesudah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	18	Bulan	
		2	16	01	2.06	09	Sebelum	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	1	Tahun	6	Tahun		
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	150	Laporan	900	Laporan	
		2	16	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	16	01	2.07	02	Sebelum	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Unit	1	Unit	1	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	2	Unit		
								Sesudah		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Unit	1	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	2	Unit	
		2	16	01	2.07	06	Sebelum	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	96	Unit
								Sesudah		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	16	Unit	96	Unit	
		2	16	01	2.07	11	Sebelum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya pendukung sarana prasarana gedung kantor	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	36	Unit
								Sesudah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	36	Unit	
		2	16	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	16	01	2.08	01	Sebelum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat dan pelayanan administrasi kantor	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	2000	Laporan	12.000	Laporan	
		2	16	01	2.08	02	Sebelum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLAJ, internet, Advetorial dan PABX Gedung kantor	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025				2026		
												Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan	
		2	16	01	2.08	04	Sebelum	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan	
		2	16	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>600</b>	<b>%</b>	
		2	16	01	2.09	01	Sebelum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Jabatan (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	21	Unit	126	Unit	
		2	16	01	2.09	02	Sebelum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional (Jasa Service, BBM, Pelumas dan Pajak)	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	63	Unit	378	Unit	
		2	16	01	2.09	06	Sebelum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	200	Unit	1.200	Unit	
		2	16	01	2.09	09	Sebelum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor	12 Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	72	Bulan
								Sesudah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	30	Unit	

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
											2021		2022		2023		2024		2025				2026		
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target	
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berbatasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	2	15	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13%	13	%	13	%	14	%	14	%	14	%	14	%	82	%	
		2	15	02	2.01			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	15	02	2.01	01	Sebelum	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana induk yang disusun	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	
							Sesudah		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	
		2	15	02	2.01	02	Sebelum	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan dan Sosialisasi yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	
							Sesudah		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2	Dokumen	
		2	15	02	2.01	03	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya forum lalulintas	Kegiatan		Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan	
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	5	Laporan
		2	15	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%	
		2	15	02	2.02	01	Sebelum	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan yang terbangun	21	Unit	Unit	Unit	3	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	18	Unit
							Sesudah		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	21	Unit	Unit	Unit	3	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	18	Unit
		2	15	02	2.02	02	Sebelum	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) yang terbangun	2576	unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	2.700	Unit
							Sesudah		Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2576	unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	450	Unit	2.700	Unit
		2	15	02	2.02	03	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan terpelihara	Unit	Unit	Unit	15	Unit	17	Unit	20	Unit	23	Unit	25	Unit	100	Unit	
							Sesudah		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Unit	Unit	15	Unit	17	Unit	20	Unit	23	Unit	25	Unit	100	Unit	
		2	15	02	2.02	04	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah unit perlengkapan jalan (PJU) terpelihara	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	4.800	Unit

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025								
											2021		2022		2023		2024		2025				2026						
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target					
							Sesudah	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	800 Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	800	Unit	4.800	Unit						
		2	15	02	2.03			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%					
		2	15	02	2.03	01	Sebelum	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen				
							Sesudah	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen			
		2	15	02	2.03	02	Sebelum	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Yang terbangun	1 Terminal		Terminal		Terminal		Terminal		2	Lahan Terminal		1	Terminal		1	Terminal	4	Terminal		
							Sesudah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit		Unit		Unit		Unit		2	Lahan Terminal		1	Unit		1	Unit		4	Unit		
		2	15	02	2.03	03	Sebelum	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah sarana prasarana terminal yang terbangun	Unit		Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		5	Unit		
							Sesudah	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit		Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit	5	Unit	
		2	15	02	2.03	04	Sebelum	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal angkutan umum yang telah berfungsi/operasional	4 Terminal		4	Terminal		4	Terminal		4	Terminal		4	Terminal		4	Terminal		4	Terminal	
							Sesudah	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit		4	Unit	24	Terminal
		2	15	02	2.03	05		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang																			
		2	15	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	600	%			
		2	15	02	2.04	01	Sebelum	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah tempat parkir yang tersedia	9 Lokasi		Lokasi		9	Lokasi		9	Lokasi		10	Lokasi		11	Lokasi		12	Lokasi	51	Lokasi

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
											2021		2022		2023		2024		2025				2026	
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
							Sesudah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20 Dokumen							
		2	15	02	2.04	02	Sebelum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas parkir yang terbina	116 orang	116 orang	116 orang	116 orang	116 orang	116 orang	116 orang	696 orang							
							Sesudah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	72 Laporan							
		2	15	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase terlaksananya kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %							
		2	15	02	2.05	01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian yang tersedia	Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit							
		2	15	02	2.05	02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah tenaga penguji yang tersedia	7 Orang	Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	5 Orang							
		2	15	02	2.05	03	Sebelum	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan Angkutan yang lulus Uji	9000 Kendaraan	9000 Kendaraan	10000 Kendaraan	11000 Kendaraan	12000 Kendaraan	13000 Kendaraan	14000 Kendaraan	69000 Kendaraan							
							Sesudah	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar		9000 Unit	9000 Unit	10000 Unit	11000 Unit	12000 Unit	13000 Unit	14000 Unit	69000 Unit							
		2	15	02	2.05	04	Sebelum	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji yang tersedia	9000 Buku Uji	10000 Buku Uji	11000 Buku Uji	12000 Buku Uji	13000 Buku Uji	14000 Buku Uji	15000 Buku Uji	75000 Buku Uji							
							Sesudah	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		9000 Dokumen	10000 Dokumen	11000 Dokumen	12000 Dokumen	13000 Dokumen	14000 Dokumen	15000 Dokumen	Dokumen							
		2	15	02	2.05	05	Sebelum	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan							
							Sesudah	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan							
		2	15	02	2.05	06	Sebelum	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Dokumen Identifikasi PKB	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen							

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
											2021		2022		2023		2024		2025				2026	
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
							Sesudah	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan							
		2	15	02	2.05	07	Sebelum	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	54 Unit							
							Sesudah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	54 Unit							
		2	15	02	2.05	08	Sebelum	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi terkait pengujian	Kali	Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali							
							Sesudah	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan							
		2	15	02	2.05	09	Sebelum	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan yang tersedia	Perda	Perda	Perda	Perda	Perda	1 Perda	Perda	1 Perda							
							Sesudah	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan							
		2	15	02	2.05	10	Sebelum	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya Money Penyelenggaraan PKB	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5 Kegiatan							
							Sesudah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan							
		2	15	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>19 Kegiatan</b>							
		2	15	02	2.06	01	Sebelum	Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah simpang tertib lalu lintas yang tertangani	21 titik lokasi	21 titik lokasi	21 titik lokasi	21 titik lokasi	21 titik lokasi	21 titik lokasi	21 titik lokasi	126 titik lokasi							
							Sesudah	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	71 Laporan							
		2	15	02	2.06	02		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	30 Jenis							
		2	15	02	2.06	03	Sebelum	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan uji coba dan sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan							

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
											2021		2022		2023		2024		2025				2026	
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
							Sesudah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen						
		2	15	02	2.06	05	Sebelum	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4 Kegiatan						
							Sesudah	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan						
		2	15	02	2.07			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %						
		2	15	02	2.07	02	Sebelum	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah SDM yang bersertifikasi penilai andalalin	Orang	Orang	Orang	Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang						
							Sesudah	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	Orang	Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	3 Orang						
		2	15	02	2.07	03	Sebelum	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Rekomendasi Andalalin	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendasi	Rekomendas	10 Rekomendas	10 Rekomendas	10 Rekomendas	10 Rekomenda	30 Rekomendas						
							Sesudah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	30 Laporan						
		2	15	02	2.07	04	Sebelum	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan						
							Sesudah	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan						
		2	15	02	2.08			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %						
		2	15	02	2.08	01	Sebelum	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Wawasan Pengembangan Personil LLAJ	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan						
							Sesudah	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	15 Orang						
		2	15	02	2.08	02	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terselenggaranya kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6 Kegiatan						
							Sesudah	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	66 Laporan						

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025				
												2021		2022		2023		2024		2025			2026			
												Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target		
		2	15	02	2.08	03	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya kegiatan pemantauan terminal	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan		
							Sesudah		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	-	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	55	Laporan
		2	15	02	2.08	04	Sebelum	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi sistem manajemen keselamatan lalu lintas	Kegiatan	-	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan		
							Sesudah		Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	15	Laporan
		2	15	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>600</b>	<b>%</b>			
		2	15	02	2.09	01	Sebelum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Perintis pedesaan yang beroperasi	6 Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	36	Unit
							Sesudah		Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	53 Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	53	Unit	318	Unit
		2	15	02	2.09	02	Sebelum	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban angkutan umum di jalan	168 kali	168	Kali	168	Kali	168	Kali	168	Kali	168	Kali	168	Kali	168	Kali	1008	Kali
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	11	Laporan	66	Laporan
		2	15	02	2.12			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0 Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>5</b>	<b>Kegiatan</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
											2021		2022		2023		2024		2025				2026	
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
		2	15	02	2.12	02	Sebelum	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kali	Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	5 Kali						
							Sesudah		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen						
		2	15	02	2.14			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600 %						
		2	15	02	2.14	01	Sebelum	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi izin	66 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	100 rekomendasi	600 rekomendasi						
							Sesudah		Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	66 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	600 Laporan						
		2	15	02	2.16			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	0%	- %	- %	- %	100 %	100 %	100 %	300 %							
		2	15	02	2.16	01	Sebelum	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan							
							Sesudah		Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen							

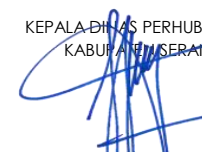
Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
												2021		2022		2023		2024		2025				2026	
												Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
		2	15	02	2.16	02	Sebelum	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang diluncurkan	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen					
							Sesudah		Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen					
		2	15	02	2.16	03	Sebelum	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengawasan yang terlaksana	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	4	Kegiatan			
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	4	Laporan			
		2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0%	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	150	%				
		2	15	03	2.07			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600	%				
		2	15	03	2.07	01	Sebelum	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengumpulan & Analisis Data Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6	Dokumen				
							Sesudah		Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Ditetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	72	Dokumen				
		2	15	03	2.10			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600	%				

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025					
											2021		2022		2023		2024		2025				2026			
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target		
		2	15	03	2.10	03	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal/Dermaga	Dermaga / pelabuhan		Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	15	Dermaga / pelabuhan		
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Laporan	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	60	Laporan	
		2	15	03	2.11			Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600	%			
		2	15	03	2.11	03	Sebelum	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	6	Lokasi		
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan
		2	15	03	2.12			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpuan Lokal</b>	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	600	%		
		2	15	03	2.12	02	Sebelum	Pembangunan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal Yang terbangun	Unit				1	Dokumen	1	Lahan Pelabuhan	1	Unit		Unit		1	Unit		
							Sesudah		Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal Yang terbangun	Unit								1	Unit		Unit		1	Unit		
		2	15	03	2.12	03	Sebelum	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpuan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal Yang terpelihara	Dermaga / pelabuhan	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	3	Dermaga / pelabuhan	15	Dermaga / pelabuhan	
							Sesudah		Jumlah Pelabuhan Pengumpuan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	15	Unit	

Tujuan	Sasaran	Kode					Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025					
											2021		2022		2023		2024		2025				2026			
											Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target		
		2	15	03	2.12	04	Sebelum	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	berfungsinya kapal patroli untuk pengawasan dan pengoperasian pelabuhan/dermaga	2 Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	12	Unit		
							Sesudah		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	72	Laporan		
		2	15	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang memiliki Izin	0%	-	%	20	%	20	%	20	%	20	%	20	%	100	%		
		2	15	04	2.01			Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	0 Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan		
		2	15	04	2.01	01	Sebelum	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Kegiatan		Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan		
							Sesudah		Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	5	Dokumen		
		2	15	05				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin	0%	-	%	50	%	50	%	50	%	50	%	50	%	250	%		
		2	15	05	2.01		Sebelum	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	0 Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan
		2	15	05	2.01	01	Sesudah	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen
									Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen
		2	15	05	2.02			Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	5	Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode						Sebelum / Sesudah	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian										Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra PD 2025			
												2021		2022		2023		2024		2025				2026	
												Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			Target	Target
		2	15	05	2.02	02	Sebelum	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksana Pengawasan pelaksanaan perkeretaapian	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	4 Perlintasan	24 Perlintasan							
							Sesudah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60 Laporan								
		2	15	05	2.06			Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan								
		2	15	05	2.06	02	Sebelum	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Yang dilaksanakan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan							
		2	15	05	2.06	02	Sesudah		Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen							

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SERANG



**BENNY YUARSA, ATD, M.Si**  
NIP. 19670909 199103 1 005



Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
		2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan aparatur perangkat daerah								
		2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	2.400.000.000
		2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah								
		2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	180.000.000
		2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	3.300.000.000
		2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	3.000.000.000
		2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	600.000.000
		2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48.468.800	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	548.468.800
		2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		505.360.037	505.360.037	605.360.037	615.360.037	615.360.037	2.846.800.185
		2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	993.740.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	1.210.000.000	7.043.740.000
		2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
		2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	801.999.800	1.004.760.000					1.806.759.800
		2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	127.172.968	554.802.270	554.802.270	614.802.270	630.850.000	650.850.000	3.133.279.778
		2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50.002.286	507.700.000	507.700.000	520.700.000	550.070.000	570.170.000	2.706.342.286
		2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	153.360.000	153.360.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	1.306.720.000
		2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	809.018.000	940.000.000	940.000.000	940.000.000	940.000.000	940.000.000	5.509.018.000
		2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	127.800.000	127.800.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	1.055.600.000
		2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
		2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	263.419.334	607.426.560	607.426.560	807.426.560	807.426.560	807.426.560	3.900.552.134
		2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.095.110.228	1.501.450.840	1.501.450.840	1.701.450.840	1.701.450.840	1.956.450.840	9.457.364.428
		2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	327.641.000	554.700.265	554.700.265	654.700.265	720.700.265	654.700.265	3.467.142.325
		2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430.505.768	1.252.550.840	1.252.550.840	1.460.550.840	1.460.550.840	1.460.550.840	7.317.259.968
Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berbatasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	36.059.748.124	43.646.063.066	42.649.874.972	54.701.570.600	51.614.784.205	53.068.367.291	281.540.408.258
		2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							
		2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	200.000.000	450.000.000	-	-	-	-	650.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	-	300.000.000	50.000.000	-	-	-	<b>350.000.000</b>
		2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	5.000.000	50.000.000	<b>205.000.000</b>
		2	15	02	2.02		<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>							
		2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	-	-	600.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	<b>2.100.000.000</b>
		2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan (PJU) di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10.630.199.380	13.341.081.000	13.341.081.000	13.341.081.000	13.341.081.000	13.341.081.000	<b>77.335.604.380</b>
		2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-	650.080.000	665.080.000	680.080.000	695.080.000	710.080.000	<b>3.400.400.000</b>
		2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	<b>90.000.000.000</b>
		2	15	02	2.03		<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Terselenggaranya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>							
		2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				200.000.000			
		2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun				9.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	<b>19.000.000.000</b>
		2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan		150.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	<b>1.450.000.000</b>
		2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	728.750.000	1.058.450.000	1.058.450.000	1.158.450.000	1.258.450.000	1.358.450.000	<b>6.621.000.000</b>
		2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya							



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	494.000.000	690.000.000	700.000.000	725.000.000	750.000.000	800.000.000	4.159.000.000
		2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	600.000.000
		2	15	02	2.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Peraturan yang tersedia					200.000.000		200.000.000
		2	15	02	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000
		2	15	02	2.06		<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>							
		2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	839.530.500	1.495.326.300	1.565.326.300	1.615.326.300	1.665.326.300	1.725.326.300	8.906.162.000
		2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ yang dilaksanakan	5.297.526.994	5.187.998.726	3.661.300.632	5.250.000.000	5.500.000.000	5.750.000.000	30.646.826.352
		2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
		2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	200.000.000
		2	15	02	2.07		<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terselenggaranya Kajian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten</b>							
		2	15	02	2.07	02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	-	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000
		2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-	30.000.000	30.000.000	480.000.000	30.000.000	30.000.000	<b>600.000.000</b>
		2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<b>Persentase Terselenggaranya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>							
		2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	314.279.000	375.504.000	375.504.000	394.279.000	413.993.000	434.692.000	<b>2.308.251.000</b>
		2	15	02	2.08	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	125.814.500	158.040.000	158.040.000	189.648.000	227.577.000	273.093.000	<b>1.132.212.500</b>
		2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal		83.160.000	83.160.000	99.792.000	119.750.000	143.700.000	<b>529.562.000</b>
		2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		348.580.000	348.580.000	418.296.000	501.955.000	602.346.000	<b>2.219.757.000</b>
		2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>							
		2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	533.073.450	712.577.840	727.577.840	890.722.300	1.202.475.105	1.623.341.391	<b>5.689.767.926</b>
		2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	925.664.300	1.053.484.400	1.181.284.400	1.309.084.400	1.436.884.400	1.564.684.400	<b>7.471.086.300</b>

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025		
								2021	2022	2023	2024	2025	2026			
								Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
		2	15	02	2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
		2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	1.500.000.000
		2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		2	15	02	2.14	'01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.120.000	76.840.800	76.840.800	102.561.600	128.282.400	154.003.200	589.648.800	
		2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								
		2	15	02	2.16	01	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	20.000.000	
		2	15	02	2.16	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	15.000.000	-	-	15.000.000	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	120.000.000
		2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	1.197.518.750	2.156.525.000	2.448.859.000	5.010.339.000	8.200.859.000	2.753.859.000	21.767.959.750
		2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pelayaran							
		2	15	03	2.07	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.805.000	252.305.000	170.000.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	1.249.110.000
		2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal							
		2	15	03	2.10	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal		428.859.000	628.859.000	628.859.000	628.859.000	628.859.000	2.944.295.000
		2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase terlaksananya kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau							

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025
									2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
		2	15	03	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	721.633.750	578.781.000	600.000.000	630.000.000	650.000.000	675.000.000	<b>3.855.414.750</b>
		2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	<b>Persentase terlaksananya kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>							
		2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang terbangun			100.000.000	2.501.480.000	5.552.000.000		<b>8.153.480.000</b>
		2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		300.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	<b>1.700.000.000</b>
		2	15	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	319.080.000	596.580.000	600.000.000	700.000.000	800.000.000	850.000.000	<b>3.865.660.000</b>
		2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	<b>Persentase tempat pendaratan dan lepas landas helicopter yang memiliki Izin</b>	0	<b>100.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>520.000.000</b>
		2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	<b>Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>							
		2	15	04	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan	0	100.000.000	110.000.000	110.000.000	100.000.000	100.000.000	<b>520.000.000</b>
		2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	<b>Persentase prasarana perkeretaapian umum yang memiliki izin</b>	0	<b>613.440.000</b>	<b>1.163.440.000</b>	<b>713.440.000</b>	<b>613.440.000</b>	<b>613.440.000</b>	<b>3.717.200.000</b>

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Target Capaian						Kondisi Pendanaan pada Akhir Priode Renstra PD 2025	
								2021	2022	2023	2024	2025	2026		
								Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp		
		2	15	05	2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<b>Terlaksananya Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian</b>								
		2	15	05	2.01	01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			550.000.000					<b>550.000.000</b>
		2	15	05	2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Terselenggaranya Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
		2	15	05	2.02	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah		613.440.000	613.440.000	613.440.000	613.440.000	613.440.000	<b>3.067.200.000</b>	
		2	15	05	2.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota</b>								
		2	15	05	2.06	02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000			<b>100.000.000</b>	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SERANG



**BENNY YUARSA, ATD, M.Si**  
NIP. 19670909 199103 1 005